

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PNPM-MANDIRI PERKOTAAN  
DI KOTA BATAM  
(Sebuah Perspektif Intervensi Sosial)**

**Penulis:**

Hartini Retnaningsih

**Editor:**

Yulia Indahri

**Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia**

**2011**

**Judul:**

Pemberdayaan Masyarakat Melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kota Batam  
(Sebuah Perspektif Intervensi Sosial)

**Penulis:**

Hartini Retnaningsih

**Editor:**

Yulia Indahri

**Tata Letak**

Sony Arifin

**Desain Sampul**

Ahans Mahabie

Cetakan Pertama, November 2011

ISBN: XXX

**Diterbitkan oleh**

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

**Alamat Penerbit**

Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## KATA PENGANTAR

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu isu aktual yang terus direspon oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Namun demikian, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan hal yang berbeda dari apa yang diharapkan oleh para perancang kebijakan dan penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu sungguh layak dihargai berbagai upaya penelitian untuk mengetahui dan menggali berbagai hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat terkait dengan pemberdayaan.

Buku berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM-MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BATAM (Sebuah Perspektif Intervensi Sosial) mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui program nasional tersebut tak selamanya mulus seperti yang direncanakan, dan jika tidak dicermati, maka hal ini akan menjadi kendala bagi upaya pemberdayaan berikutnya.

Buku ini menganalisis pendampingan masyarakat di bidang infrastruktur di Kota Batam dari perspektif intervensi sosial, dimana peran pendamping menjadi sentral di tengah program pemberdayaan. Buku ini juga mencatat tentang pentingnya memperhatikan kondisi wilayah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Besar harapan, buku ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka memahami pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi  
Sekretariat Jenderal DPR RI



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kota Batam, pendampingan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan itu sendiri. Pendampingan merupakan upaya untuk mengantarkan masyarakat dalam rangka mengubah kondisi kehidupannya agar menjadi lebih baik. Pendampingan dilakukan oleh para pendamping yang terpilih melalui seleksi tertentu berdasarkan kompetensi di bidangnya.

Buku berjudul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM-MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BATAM (Sebuah Perspektif Intervensi Sosial) ini akan menguraikan tentang tugas para pendamping program PNPM-Mandiri di lapangan yang tak selalu mulus, di mana banyak hal yang menjadi kendala dalam tugas mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Batam. Buku ini merupakan hasil penelitian di Kota Batam pada tahun 2010. Jika dilihat dari perintah dan pedoman kerjanya, tugas pendampingan itu adalah tugas yang berat karena terkait dengan upaya mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, dan ketika dilihat dalam kenyataan di lapangan, ternyata banyak hal yang kurang kondusif yang dapat berdampak pada efektivitas program.

Tulisan ini mengemukakan pentingnya peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat melalui PNPM-Mandiri Perkotaan di Kota Batam. Kondisi lapangan dengan medan sulit, kondisi sosial budaya masyarakat yang belum tentu kondusif dengan target yang ditetapkan penyelenggara program, honor pendamping yang kurang memadai untuk tugas pendampingan di wilayah tertentu, kurangnya dukungan pemerintah setempat, dan sebagainya merupakan kembang-kembang pengalaman para pendamping. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa proses pendampingan merupakan proses yang penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Batam, dan proses tersebut merupakan sebuah intervensi sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan kualitas pendampingan secara kontinyu.

Besar harapan, buku ini akan menambah koleksi kekayaan Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya yang terkait dengan intervensi sosial melalui pendampingan PNPM-Mandiri.

Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metodologi .....	8
BAB II    INTERVENSI SOSIAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: KERANGKA PEMIKIRAN DAN KONSEP.....	15
A. Intervensi Sosial .....	16
B. Pemberdayaan.....	19
C. Masyarakat Miskin .....	21
BAB III    KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM .....	25
A. Kemiskinan.....	25
B. Pemberdayaan.....	31
BAB IV    PNPM-MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BATAM.....	37
A. PNPM-Mandiri .....	37
B. PNPM-Mandiri Perkotaan .....	45

BAB V	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PNPM-MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BATAM: PERSPEKTIF INTERVENSI SOSIAL .....	53
A.	Pendamping.....	54
B.	Peran Pemerintah Kota .....	70
C.	Modifikasi Intervensi .....	74
BAB VI	PENUTUP .....	79
	DAFTAR PUSTAKA DAN RUJUKAN.....	83